

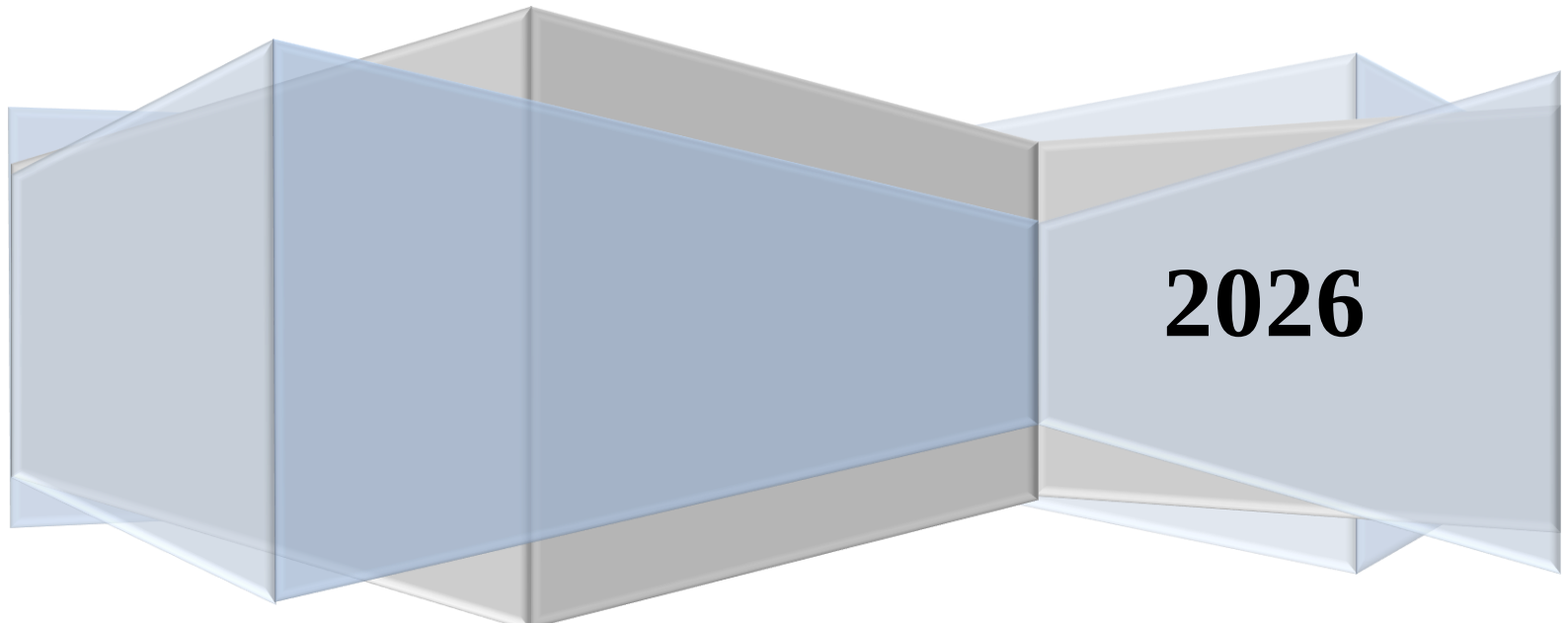


**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

KERANGKA ACUAN KERJA

BIRO PEREKONOMIAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



2026

A. KAK Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro

Latar Belakang : Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Capaian pertumbuhan ekonomi yang optimal mencerminkan peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

Dalam rangka menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN periode 2025-2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% maka Pemprov Jawa Tengah menargetkan pertumbuhan pada tahun 2030 sebesar 6.4-8%.

Di sisi lain, Stabilitas harga merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi yang terkendali tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan peningkatan produktivitas. Inflasi yang terkendali mendorong kestabilan ekonomi makro, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, dan membuka ruang bagi ekspansi sektor riil. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menekan laju kenaikan harga, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat antar perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta pelaku usaha. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan stabilitas harga bahan pokok, kelancaran distribusi barang, dan ketersediaan pasokan dapat terjaga, terutama menjelang momen-momen hari besar keagamaan dan akhir tahun sehingga tingkat inflasi tetap terjaga dalam rentang target Inflasi Nasional sebesar $2.5 \pm 1\%$.

Penyusunan kegiatan terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan inflasi yang terkendali. Dengan demikian, Jawa Tengah dapat terus bergerak menuju perekonomian yang tangguh, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Maksud dan Tujuan : a. Memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
b. Meningkatkan koordinasi pusat dan daerah.
c. Mendorong komitmen bersama untuk mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah;

- d. Mendorong pembentukan ekosistem rantai pasok pangan yang lebih efektif dalam upaya penguatan ketahanan pangan Jawa Tengah melalui kolaborasi nyata

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	215.000.000
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	131.847.700
2.	Fasilitasi dan Koordinasi Kinerja Ekonomi Daerah	83.152.300

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2026

Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2026

Sumber Dana : APBD

B. KAK Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

Latar Belakang : Tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya adalah keterbatasan akses keuangan masyarakat. Saat ini masyarakat belum sepenuhnya bisa merasakan akses dari lembaga keuangan terutama di sektor pembiayaan. Masih banyak sektor seperti perikanan, pertanian, kaum disabilitas, belum secara optimal mendapatkan akses keuangan. Hal ini membatasi kapasitas mereka untuk mengembangkan usaha, memperluas produksi dan akses pasar.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan mencapai 66.46% lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan mencapai 80.51%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan produk/ layanan jasa keuangan masyarakat di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman masyarakat sebelum menggunakan produk/ Layanan tersebut. Hal ini menjadi PR bersama kita semua bagaimana meningkatkan literasi masyarakat Jawa Tengah agar masyarakat di Jawa Tengah tidak banyak yang terjatuh pinjaman online ilegal dan judi online.

Tingkat literasi keuangan syariah Jawa Tengah menunjukkan peningkatan pada periode survey tahun 2016, 2019, 2022. Tingkat literasi keuangan syariah Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 18.56% lebih tinggi daripada nasional (9.14%) dan tertinggi kedua setelah Jawa Barat (19.74%)

Tingkat inklusi keuangan syariah Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan dari sebelumnya (12.57%) pada tahun 2019. Tingkat literasi keuangan syariah Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 15.06% lebih tinggi sedikit diatas nasional (12.12%)

Tantangan pengembangan ekonomi syariah Jawa Tengah:

- Literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah
- Rendahnya sertifikasi halal pada UMKM & keterbatasan fasilitas RPH/RPU halal di daerah (belum merata)
- Akses pembiayaan syariah masih terbatas untuk UMKM
- Keterbatasan SDM yang menguasai produk syariah
- Regulasi yang belum terimplementasi optimal di kabupaten/kota

Sektor pariwisata dianggap strategis karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pembangunan infrastruktur, sementara penanaman modal (investasi) menyediakan dana dan sumber daya untuk dapat meningkatkan perekonomian Jawa Tengah.

Pemerintah Jawa Tengah terus berupaya untuk mendorong

promosi pariwisata ramah muslim. salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam rangka Pengembangan Ekonomi. sehingga diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. selain itu Pemerintah Jawa Tengah juga terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan pariwisata baik regulator. pelaku industri. ataupun penggiat wisata dan komunitas. dalam menata profil pariwisata di Jawa Tengah dengan tekad untuk mewujudkan Jawa Tengah menjadi destinasi pariwisata ramah muslim terbaik di Indonesia.

Maksud dan Tujuan : Maksud dilaksanakan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Mikro. Penanaman Modal. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan Bidang Ekonomi Mikro. Penanaman Modal. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Ekonomi Mikro. Penanaman Modal. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung Pembangunan di Jawa Tengah serta mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	200.000.000
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. LKM dan UKM	36.953.000
2.	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan komite daerah ekonomi dan keuangan syariah	85.000.000
3.	Penyusunan Ringkas Kebijakan Bidang Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. LKM dan UKM	78.047.000
B.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	400.000.000
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	143.004.000
2.	Penyusunan Ringkas Kebijakan Bidang Penanaman Modal. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	256.996.000

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2026
 Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2026
 Sumber Dana : APBD

C. KAK Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan

Latar Belakang : Dalam RPJMD Jawa tengah Tahun 2025-2029. salah satu sasaran adalah Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing. Inklusif. Dan Berbasis Lingkungan. Pencapaian sasaran tersebut diarahkan dengan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan produktivitas sumber daya manusia. digitalisasi. serta berbasis riset dan inovasi. Sementara arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 adalah meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan. Kelautan. Perikanan dan Pertanian (KPKP2)
2. Penyusunan rekomendasi bersama stakeholder mitra bidang Ketahanan Pangan. Kelautan. Perikanan dan Pertanian serta peternakan.
3. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi agar mudah bagi petani
4. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Rutin Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 3 Tahunan berupa Pekan Daerah (PEDA) dan Pekan Nasional (PENAS)
5. Koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat di Jawa Tengah
6. Koordinasi kegiatan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak
7. Koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan
8. Fasilitasi pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food
9. Fasilitasi percepatan Pengembangan Pangan Lokal
10. Fasilitasi Penerapan fortifikasi beras
11. Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBHCHT

Maksud dan Tujuan : Penyusunan KAK dimaksudkan sebagai pedoman program dan kegiatan selama satu tahun. Selain itu. dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan penyusunan KAK adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan pada Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2026. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 2. Sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Pengarah dan Ketua Kelompok Kerja selama Tahun Anggaran 2026 dan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun berikutnya
 3. Untuk mewujudkan sinergi antara program dan kegiatan
-

antara Biro dan OPD ampunan lingkup Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan	231.779.000
1.	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian dan Peternakan	175.030.000
2.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian dan Peternakan	21.288.000
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian dan Peternakan	35.461.000
B.	Jumlah Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	1.000.000.000
1.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBHCHT	1.000.000.000
C.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pangan	125.000.000
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pangan	45.024.000
2.	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pangan	39.988.000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pangan	39.988.000
D.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan	106.133.000
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	34.823.000
2.	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	36.110.000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	35.200.000

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2026
Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2026
Sumber Dana : APBD dan DBHCHT

D. KAK Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Latar Belakang : Lingkungan Hidup Berkualitas masuk dalam salah satu arah pengembangan dalam sasaran pokok RPJPD 2025 – 2045 yakni terwujudnya ketahanan sumber daya alam. lingkungan hidup dan bencana. Dalam mendukung lingkungan hidup yang berkualitas kebijakan diarahkan pada perlindungan wilayah. pemulihan wilayah. pencadangan wilayah. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. pengolahan sampah terintegrasi berbasis masyarakat dan penyediaan sanitasi aman.

Pembangunan yang berlandaskan sumberdaya alam telah memberikan peluang berbagai usaha untuk membantu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam yang terus menerus dan berkebihan akan memberikan dampak negatif dalam jangka panjang karena keterbatasan daya dukung serta daya tampungnya. dan jika hal tersebut diteruskan maka lingkungan hidup akan mencapai titik kritis sehingga tidak mampu memelihara diri secara alami dan tidak dapat memberikan jasa secara optimal

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk pertanian serta pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat strategis. permasalahan disektor kehutanan semakin kompleks. Permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus tidak bisa lagi hanya didekati dengan solusi yang bersifat teknis kehutanan saja. Saat ini. permasalahan kehutanan telah bergeser dari permasalahan yang bersifat teknis ke permasalahan ekonomi. sosial. dan dampak kebijakan kegiatan pembangunan diluar kegiatan kehutanan pada kawasan hutan yang harus ditangani segera termasuk dalam perencanaan pengelolaannya

Tekanan-tekanan terhadap lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperhatikan atau memperkuat pengelolaan. perlu cara baru untuk melindungi potensi keanekaragaman hayati yang berada di dalam kawasan hutan. Untuk itu perlu langkah penting dan strategis untuk melakukan monitoring. evaluasi. dan pengendalian agar terjaga keberadaan dan kelestariannya. dilain pihak kepentingan yang strategis lainnya bisa dilaksanakan.

Untuk itu agar pelaksanaan Pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jawa Tengah betrhasil dan tepat guna maka dilaksanakan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung pelayanan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 terdapat isu strategis Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan bidang LHK
2. Penyusunan rekomendasi bersama stakeholder mitra bidang LHK
3. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan danau prioritas nasional
5. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan sampah
6. Fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah

Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dikelola dengan baik, agar mendapatkan keluaran berupa terfasilitasinya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkoordinasikannya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan tercapainya Kinerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan : Maksud dilaksanakan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung Pembangunan di Jawa Tengah serta mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	175.870.000
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41.300.000

2.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	94.863.000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	39.707.000

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2026
 Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2026
 Sumber Dana : APBD

E. KAK Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Latar Belakang : Energi dan air merupakan dua sumber daya strategis yang menjadi pilar fundamental bagi kelangsungan hidup, ketahanan nasional, dan percepatan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Energi, dalam berbagai bentuknya, menggerakkan roda industri, transportasi, dan rumah tangga. Sementara itu, air adalah prasyarat untuk ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, kedua sektor ini menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait. Di sektor energi, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat harus diimbangi dengan komitmen transisi menuju energi bersih dan terbarukan, serta menjamin keterjangkauan dan keadilan akses. Di sektor air, tekanan akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan mengancam ketersediaan dan kualitas air bersih.

Oleh karena itu, pengelolaan energi dan air tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah. Keduanya memerlukan pendekatan yang terintegrasi, holistik, dan berwawasan lingkungan untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan ketahanan sumber daya di masa depan.

Di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di Jawa Tengah.

Menjalankan fungsi sekretariat daerah meliputi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pada kebijakan energi dan air terdapat permasalahan dan tantangan meliputi :

1. Fragmentasi dan Tumpang Tindih Kebijakan. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi berpotensi tumpang tindih, tidak selaras, bahkan bertolak belakang, sehingga menimbulkan inefisiensi dan menghambat pencapaian tujuan nasional.
 2. Ketergantungan pada energi fosil, rasio elektrifikasi yang belum merata, krisis air bersih di berbagai daerah, serta dampak perubahan iklim (kekeringan dan banjir) memerlukan solusi yang multidimensi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
 3. Perlunya sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
-

4. Kesenjangan Implementasi di Lapangan antara Pusat dan Daerah.
5. Data dan evaluasi yang objektif terhadap kebijakan sebelumnya.

Melalui anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan. koordinasi. sinkronisasi dan evaluasi kegiatan konservasi energi melalui manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Koordinasi. sinkronisasi dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan Geopark di Jawa Tengah.
3. Koordinasi. pemantauan dan evaluasi capaian sasaran program pada perangkat daerah bidang energi dan sumber daya mineral

Maksud dan Tujuan : Dengan demikian. kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi bukanlah sekadar aktivitas administratif. melainkan suatu proses strategis yang fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui kegiatan ini. diharapkan tercipta sebuah tata kelola kebijakan energi dan air yang terpadu. responsif terhadap tantangan zaman. dan mampu mewujudkan kemandirian serta kedaulatan energi dan air untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan koordinasi. sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air adalah :

1. Mewujudkan Ketahanan Energi dan Air Nasional yang berkelanjutan. berkeadilan. dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya dengan meminimalisir pemborosan dan inefisiensi akibat kebijakan yang tidak terkoordinasi.
3. Mempercepat Transisi Energi Bersih dan penerapan praktik pengelolaan air yang berkelanjutan (sustainable water management).
4. Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) melalui proses evaluasi yang berintegritas.
5. Memperkuat Kolaborasi dan Sinergi antar pemangku kepentingan. baik pemerintah. swasta. akademisi. maupun masyarakat sipil

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	206.218.000
1.	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	24.120.000

2.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	25.360.000
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	156.738.000

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2026
 Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2026
 Sumber Dana : APBD

F. KAK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Latar Belakang : Dalam rangka menunjang kelancaran penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Biro serta pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diperlukan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran pada lingkup administrasi ketatausahaan Biro perlu dikelola dengan baik agar mendapatkan keluaran berupa terfasilitasinya kinerja organisasi dan ASN yang efektif dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku

Maksud dan Tujuan : Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk mensinergikan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan lintas sektor baik di pusat dan daerah lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah tercapai sinergi dan sinkronisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah, capaian program OPD ampuan serta kegiatan pendukung lain dalam rangka menunjang kinerja tugas pokok dan fungsi biro

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.884.000
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Biro Perekonomian	111.823.500
2.	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Biro Perekonomian	69.344.500
3.	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Perekonomian (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	1.325.000
4.	Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup Biro Perekonomian (IKM)	1.325.000
5.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Rumpun Biro Perekonomian	19.066.000

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2026

Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2026

Sumber Dana : APBD

G. KAK Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Latar Belakang : Dalam rangka menunjang kelancaran penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Biro serta pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diperlukan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran pada lingkup administrasi ketatausahaan Biro perlu dikelola dengan baik agar mendapatkan keluaran berupa terfasilitasinya kinerja organisasi dan ASN yang efektif dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku

Maksud dan Tujuan : Maksud dilaksanakannya kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang terstruktur dan terstandar di lingkungan SKPD. Sistem ini mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis, baik yang aktif (sering digunakan) maupun inaktif (jarang digunakan), sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Tujuan dilaksanakannya kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis adalah untuk tertib administrasi kearsipan sesuai dengan penyusunan tata naskah dinas yang berlaku, kemudahan akses dan menjamin ketersediaan bukti akuntabilitas

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000
1.	Penataan Administrasi Umum Biro	15.000.000

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2026

Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2026

Sumber Dana : APBD